

## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUSU SAPI PERAH DI KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

Dimas Novendra Alfianto<sup>1</sup>, Rossy Lambelanova\*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, Indonesia; e-mail: [dimasnovendra@gmail.com](mailto:dimasnovendra@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia; e-mail: [rossylambelanova@ipdn.ac.id](mailto:rossylambelanova@ipdn.ac.id)

\*Correspondence

Received: 07-10-2021; Accepted: 29-11-2021 ; Published: 30-11-2021

**Abstrak:** Kabupaten Boyolali merupakan Kabupaten dengan populasi sapi dan penghasil daging serta susu terbesar di Jawa Tengah. Namun melimpahnya potensi sumberdaya tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM. Dengan adanya fenomena ini, peran pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali memiliki tugas penting memberdayakan pelaku UMKM susu sapi perah dalam memaksimalkan potensi yang ada dan kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, mengetahui faktor penghambat program pemberdayaan, serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan produktifitas UMKM susu sapi perah. Metode penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tahapan pemberdayaan yaitu kegiatan penyadaran dan pembentukan perilaku, melakukan transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, serta melaksanakan peningkatan kemampuan intelektual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan UMKM susu sapi perah di Kabupaten Boyolali sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapakendala diantaranya adalah kurangnya inovasi pengembangan produk, sifat dasar susu sapi yang mudah basi sehingga mempersulit pengolahan, serta keterbatasan dana menyebabkan terganggunya pemberdayaan. Direkomendasikan melaksanakan proses pemberdayaan dengan: Pembinaan atau pendampingan berkesinambungan atau berkelanjutan oleh stakeholders terkait, penyesuaian waktu pelatihan, pelatihan dilaksanakan secara luring dan daring, penciptaan mitra usaha atau paguyuban, kemudahan dan fasilitasi perizinan usaha, memanfaatkan teknologi informasi guna memperluas jaringan pemasaran

**Kata Kunci:** Usaha Mikro Kecil Menengah, Pemberdayaan, Kesejahteraan.

**Abstract:** Boyolali Regency is a Regency with a cattle population and the largest producer of meat and milk in Central Java. However, the abundance of potential resources has not been utilized optimally by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Given this phenomenon, the role of the government through the Department of Cooperatives and Manpower of Boyolali Regency has an important task of empowering dairy cow milk SMEs in maximizing the existing potential and then using it to improve welfare. The purpose of this study was to analyze how the implementation of MSME empowerment carried out by the Boyolali District Cooperatives and Manpower Service, to find out the inhibiting factors of the empowerment program, and to analyze the efforts made by the Boyolali District Cooperatives and Manpower Service in increasing the productivity of dairy cows MSMEs. This research method is a descriptive qualitative research design with a deductive approach. The data collection technique used in this research is through the results of interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using the

*stages of empowerment, namely awareness and behavior formation activities, transforming knowledge and skills, and carrying out intellectual ability enhancement. The results of this study indicate that the implementation of the dairy cow's milk MSME empowerment program in Boyolali Regency has been running well, but there are still several obstacles including the lack of product development innovation, the nature of cow's milk that is easily spoiled making processing difficult, and limited funds causing disruption of empowerment. It is recommended to carry out the empowerment process by: Continuous or sustainable guidance or assistance by relevant stakeholders, adjustment of training time, training carried out offline and online, creation of business partners or associations, ease and facilitation of business licensing, utilizing information technology to expand marketing networks*

**Keywords:** *UMKM, Empowerment, Welfare*

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan perekonomian nasional didasarkan pada tiga elemen yang perlu diperhatikan oleh suatu pemerintahan meliputi berbagai sumber daya, baik sumber daya alam, manusia, maupun teknologi. Elemen-elemen tersebut bergerak secara harmonis dan berkesinambungan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang. Kesejahteraan masyarakat terlihat pada meningkatnya output perkapita sekaligus menciptakan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Boediono, 1993)

Pemerintah memberi perhatian lebih kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang berskala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mumpuni, berkualitas, dan berkeahlian dalam bidang produksi. Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkemampuan mengelola dan mendayagunakan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini karena merupakan kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki berdasarkan kepentingan dan potensi yang dimilikinya, sehingga diharapkan pemerintah daerah dengan kewenangan masing-masing mampu mengelola melimpahnya berbagai potensi sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya menjadi optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan akses dalam melakukan usaha dan melakukan investasi, pemberdayaan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan peran masyarakat menuju

daya saing daerah, pemerataan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial antar elemen masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengembangkan dan membantu perekonomian pada kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), difokuskan terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia dengan melalui program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti halnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan diadakannya program pemberdayaan pada UMKM susu sapi perah. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu bentuk strategis yang menjadi alternatif pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menyerap banyak sumber daya manusia dengan menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang selanjutnya dapat mendongkrak peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini sependapat dengan (Susilowati, A., Hambali, I., & Wahyuni, 2019), menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara guna meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat.

Kabupaten Boyolali adalah salah satu daerah penghasil produksi susu sapi perah terbesar di Jawa tengah dengan selisih volume produksi sangat jauh dibandingkan kabupaten lainnya, sesuai data (BPS, 2019) produksi susu di Kabupaten Boyolali kurang lebih` sekitar 49.716,94 (Kilo Liter), oleh sebab itu Kabupaten Boyolali mendapat julukan “Boyolali kota susu” dari masyarakat Jawa Tengah. Produksi susu sapi perah yang sangat melimpah dan didukung dengan banyaknya populasi sapi perah di Boyolali, menurut informasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali populasi hewan ternak sapi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 mencapai 188.000 ekor dengan rincian 92.000 ekor sapi perah dan 96.000 ekor sapi potong. Dengan banyaknya populasi sapi perah tersebut membuat semakin berkembangnya usaha skala mikro dan menengah yang memanfaatkan susu sapi sebagai bahan baku olahan. Setiap tahunnya jumlah UMKM susu sapi perah Kabupaten Boyolali selalu mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan.

Dengan melimpahnya potensi susu sapi perah tersebut, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan tenaga Kerja Kabupaten Boyolali beserta dinas-dinas terkait berkeinginan untuk mendukung dan memaksimalkan kegiatan UMKM susu sapi perah agar mempunyai kualitas yang dapat bersaing sehingga dapat menarik pangsa pasar untuk berbelanja produk olahan susu sapi dari UMKM (Muzha, 2013). Hal ini dilakukan

dengan melakukan program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian pelaku UMKM maupun masyarakat Kabupaten Boyolali.

Wujud dari pemberdayaan UMKM susu sapi perah ini berupa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman intelektual pelaku UMKM susu sapi perah di Kabupaten Boyolali, sehingga mereka dapat lebih maju dan berdaya saing (Yuniasari et al., 2021). Adanya kegiatan pelatihan ini sejalan dengan (Ahmada, 2019), yaitu kegiatan pemberdayaan dilaksanakan bertahap diawali dengan mendistribusikan bantuan sapi gratis kepada para peternak sapi dan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan guna mendukung kemajuan usaha peternak sapi.

Berdasarkan penuturan dari Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, potensi susu sapi perah yang melimpah ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini dikarenakan kurangnya inovasi pengembangan produk susu sapi menjadi olahan baru, kebanyakan para pelaku UMKM hanya menjual susu sapi secara murni tanpa mengolahnya menjadi olahan baru sehingga nilai jualnya masih rendah. Apabila pelaku usaha mampu berinovasi untuk mengolah susu menjadi produk baru maka nilai jualnya pun menjadi tinggi, dan dapat memberikan keuntungan berkelanjutan, artinya keuntungan yang diperoleh dapat diterima pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang (Saraswati, E., Hatneny, A. I., & Dewi, 2020)

Harga jual susu murni di pasaran hanya mencapai Rp 8.000,- untuk satu liternya, sedangkan harga jual susu yang diolah menjadi susu kemasan atau minuman susu berperisa mencapai kisaran Rp 20.000,- per liternya. Masih banyaknya pelaku UMKM susu sapi yang hanya menjual produk berupa susu murni yang bernilai jual murah tentu belum mampu meningkatkan perekonomian pelaku usaha secara optimal karena perolehan laba yang sedikit. Sehingga tidak sedikit pelaku UMKM susu sapi yang masih berpendapatan rendah atau usahanya dapat dikatakan berjalan ditempat dan bahkan merugi (Sawitri et al., 2018).

Boyolali sebagai kota susu dan juga sering di juluki sebagai *New Zealand van Java* oleh masyarakat Jawa Tengah. Julukan ini layak diberikan kepada Kabupaten Boyolali karena Boyolali merupakan sentra penghasil susu perah dan daging sapi potong terbesar di Jawa Tengah. Berikut ini merupakan data penerimaan dan penjualan susu sapi perah kecamatan dengan produktifitas tinggi di Kabupaten Boyolali.

**Tabel 1.**

Data Penerimaan dan Penjualan Susu Sapi Perah Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No.	Kecamatan	Penerimaan	Penjualan
1.	Cepogo	7.300.000	6.935.000
2.	Musuk	11.680.000	11.096.000
3.	Boyolali	6.570.000	6.241.500
4.	Mojosongo	16.425.000	15.603.750
5.	Lainnya (Penampung)	7.741.941	7.741.941
Jumlah		49.716.941	47.618.191

Sumber: Badan Pusat Statistika 2019

Dari data di atas, empat Kecamatan tersebut merupakan sentra penghasil susu terbesar di Kabupaten Boyolali setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Kecamatan Cepogo memproduksi susu sapi perah dari peternak sebesar 7,3 juta liter dan berhasil menjual 6,9 juta liter. Begitu juga dengan Kecamatan Musuk, Boyolali, Mojosongo, dan kecamatan lainnya dengan total penerimaan 49,7 juta liter dan berhasil di jual ke pasaran 47,6 juta liter.

Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini karena jika dilihat dari potensi sumber dayanya Kabupaten Boyolali memiliki hasil produksi susu sapi perah yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, pemerintah juga mendukung kegiatan UMKM susu sapi melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah secara rutin dan bertahap. Namun kenyataannya banyak pelaku UMKM susu sapi yang belum memaksimalkan potensi dan dukungan pemerintah tersebut secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kemampuan manajemen pengelola maupun kemampuan masyarakat dalam pengolahan produk (Sandy et al., 2021).

Permasalahan lain adalah kualitas susu segar yang dihasilkan peternak dibawah standar yang ditetapkan oleh IPS (Industri Pengolahan Susu), sehingga susu tersebut ditolak dan peternak mengalami kerugian. Selain itu kondisi indukan sapi perah yang dipelihara merupakan sapi-sapi turunan ketiga bahkan keempat dari induk yang unggul. Semakin panjang rantai turunan, semakin turun produktivitas susu yang dihasilkan (Barokah, 2009)

Berdasarkan fenomena permasalahan diatas serta begitu besarnya potensi atau sumber daya yang dimiliki Kabupaten Boyolali dari hasil produksi susu sapi perah maka diperlukan usaha pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif dan kreatif sehingga

dapat menggerakkan para peternak sapi perah meningkatkan nilai tambah atau *value added* guna meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka, sesuai dengan (Lord & Hutchison, 2014) bahwa konsep pemberdayaan modern yang dapat meningkatkan kapasitas elemen manusia dalam kegiatan organisasi modern sehingga menghasilkan hasil kinerja/ *performance* yang tinggi (kepercayaan diri, inovasi, pemikiran independen dan kewirausaha) bagi individu dan organisasinya. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana upaya pemberdayaan UMKM susu sapi perah di Kabupaten Boyolali dan apa faktor penghambatnya serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktifitas UMKM susu sapi perah Kabupaten Boyolali.

## **II. Kajian Pustaka**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Suharto, 2014b), pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan dalam mendayagunakan kelompok lemah termasuk kelompok miskin dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada perubahan sosial yang ingin diwujudkan. Menurut Djohani dalam (Anwas, 2014) pemberdayaan adalah suatu proses mewujudkan keseimbangan antara pihak yg berkuasa (*power*) dengan pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) pihak yang lebih/ over berkuasa (*powerfull*).

### **2. Tahap Pemberdayaan**

Pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses, dimana dalam proses terdapat berbagai tahapan yang dilakukan secara berkelanjutan serta tidak dapat dilaksanakan dengan cara instan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberdayaan dilaksanakan secara terus menerus dengan langkah yang diambil bersifat jelas dan tepat sasaran. (Soekanto & Abdullah, 1987) membagi tahapan pemberdayaan menjadi tujuh tahap antara lain:

1. persiapan;
2. pengkajian;
3. perencanaan program;
4. pemformalisasi rencana aksi;
5. pelaksanaan implementasi program;
6. evaluasi;
7. terminasi

Selain pendapat ahli diatas, pendapat (Sulistiyani, 2004) juga membagi upaya pemberdayaan menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penyadaran dan pembentukan perilaku

yaitu mengubah mind set/ pola pikir agar tercipta kesadaran perlunya meningkatkan kapasitas diri. Sasaran dalam tahap ini adalah dibutuhkan perubahan agar kehidupan lebih sejahtera.

2. Transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan

Pada tahap ini dilakukan pembelajaran berbagai pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan kemampuan. Sehingga tercapai sasaran dari pemberdayaan yaitu memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sebagai nilai tambah dari potensi yang dimiliki.

3. Peningkatan kemampuan intelektual

Merupakan tahap pengayaan terhadap berbagai keterampilan masyarakat dalam pemberdayaan. Sasaran pada tahap ini diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan yang mengarah kepada kemandirian.

Dalam mengkaji hasil penelitian ini, penulis menggunakan konsep pemberdayaan dari (Sulistiyani, 2004) yang membagi pemberdayaan menjadi tiga dimensi tahapan yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dan peningkatan kemampuan intelektual, dengan tahapan-tahapan ini pemberdayaan lebih mengakar (Lambelanova, 2019), karena dimulai dengan penyadaran akan pentingnya pemberdayaan untuk para pelaku UMKM tersebut, sehingga setelah sadar maka akan mudah untuk melaksanakan tahap-tahap pemberdayaan selanjutnya.

Berkaitan dengan pemberdayaan peternak sapi perah (Sawitri et al., 2018) menyampaikan Proses Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan pelatihan, dan pendampingan. Metode ini meliputi proses sampai hasil yang diinginkan. Adapun metode yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Potensi Pengolahan Susu

Metode yang digunakan adalah melakukan pemaparan, diskusi, dan tanya jawab. Dalam pemaparan memberikan informasi mengenai manfaat mengkonsumsi susu sapi, produk olahan yang bisa dihasilkan dari susu sapi serta menjelaskan berbagai produk olahan dari susu sapi tersebut.

2. Pelatihan Pengolahan Susu

dilakukan dengan mendemonstrasikan cara pembuatan dari yoghurt dan kerupuk susu, sebelumnya penyelenggara menyediakan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produk olahan susu sapi.

Metode pada kegiatan kedua ini adalah diskusi, tanya jawab, serta demonstrasi langsung yang dilakukan oleh mitra dan pengarah yang dilakukan oleh penyelenggara diantaranya mengenai pemilihan bahan, proses pembuatan, dan alat yang digunakan.

### 3. Pendampingan Manajemen Usaha

Dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah melakukan pemaparan, diskusi, dan tanya jawab. Pemaparan mengenai siklus hidup organisasi/ perusahaan, peluang bisnis serta resiko bisnis, harga pokok penjualan, dengan memperhitungkan biaya produksi secara variabel costing maupun full costing, penjelasan sistem pencatatan terpisah termasuk membuat laporan keuangan, selanjutnya menjelaskan bagaimana strategi pemasaran produk baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi atau media online seperti facebook, WhatApps, Instagram dan google buinesss.

### 4. Evaluasi Pelaksanaan

Guna mengetahui berbagai permasalahan, penyelenggara dan mitra melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan setelah melaksanakan pelatihan pembuatan produk olahan yang berbahan baku susu sapi. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah diskusi serta tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi mitra khususnya dalam manajemen usaha sehingga hasil dari diskusi ini diperoleh solusi atau pemecahan masalah.

## **3. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan orang-orang yang lemah/ *powerless* (Suharto, 2014a). Gagasan ini sejalan dengan tujuan dari pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan atau mewujudkan individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian dalam berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh mereka (Sulistiyani, 2004).



### **III. Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dimana pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada penyajian fakta kajian yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan yang akan penulis selidiki dengan mempelajari masalah-masalah dan yang penulis temukan sendiri dengan penyajian data dalam bentuk deskripsi bukan dalam bentuk analisis statistika.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumen, *focus group discussion*, dan disempurnakan dengan triangulasi data (Simangunsong, 2017) Selanjutnya digunakan analisis triangulasi untuk menguji keabsahan data, atau teknik yang dikenal dengan istilah *check*, *recheck*, dan *cross check*, yaitu penyajian data awal penelitian sebagai dasar untuk melakukan eksplorasi dalam melaksanakan penelitian atau proses *recheck* data hasil penelitian, selanjutnya dilakukan *cross chek* untuk menguji validitas dan rehabilitas dalam penelitian kualitatif (Satori & Komariah, 2019)

Dalam rangka memperoleh data penelitian, teknik yang digunakan penulis dalam pengambilan data adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data-data sekunder, diantaranya dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi terkait fokus penelitian sebagai sumber data yang tersedia di lapangan atau di lokus penelitian (Darwis, 2013).

Informan pada penelitian ini terdiri dari 6 (enam) pihak dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali yang berjumlah 12 orang, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Peternak Sapi Perah, Pelaku UMKM susu sapi perah.

### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Gambaran Umum**

Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah kaki Gunung Merapi dan Merbabu membuat wilayah Boyolali sangat cocok sebagai lahan peternakan dan pengembangan UMKM yang mengolah ternak. Kabupaten Boyolali terkenal sebagai kota susu dan dijuluki sebagai *New Zealand Van Java* karena Kabupaten Boyolali merupakan penghasil susu sapi nomor satu atau terbesar di Jawa Tengah dan sebagai populasi sapi terbesar kedua di Pulau Jawa.

Menurut data dari BPS Kabupaten Boyolali, produksi susu sapi mencapai 49.716.941 liter pada tahun 2019. Produksi susu sapi yang melimpah ini semakin mendorong UMKM susu sapi berkembang dan menjadi ikon kabupaten yang sangat diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

## **2. Upaya Pemberdayaan UMKM Susu Sapi Perah Kabupaten Boyolali**

Bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dalam melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM susu sapi perah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini lah yang menjadi dasar penulis menggunakan pendapat (Sulistiyani, 2004) mengenai pemberdayaan yang terbagi menjadi tiga tahapan untuk menganalisis upaya pemberdayaan UMKM susu sapi perah di Kabupaten Boyolali khususnya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja serta agar dapat menemukan solusi pemecahan masalah yang terjadi. Berdasarkan teori tersebut penulis telah menganalisis dengan dimensi - dimensi:

### **a) Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku**

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap awal atau tahap persiapan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah sebagai salah satu aktor pemberdayaan berusaha membangun situasi dan kondisi atau keadaan agar dapat terwujud pelaksanaan program pemberdayaan. Upaya penyadaran diharapkan mampu membentuk pola pikir masyarakat untuk belajar dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Penulis telah mengaitkan upaya pemberdayaan UMKM susu sapi perah oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap 3 indikator tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang dikemukakan oleh (Sulistiyani, 2004).

#### **a. Adanya Upaya Penyadaran**

Dalam pemberdayaan UMKM susu sapi perah, Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja melakukan sosialisasi yang bertujuan menyadarkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya ke arah lebih maju dan mandiri. Penyadaran diharapkan mampu menciptakan perilaku UMKM susu sapi yang dapat menyelesaikan kompleksitas masalah usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada pemerintah maupun orang lain. Adanya kegiatan penyadaran ini sejalan dengan teori tahap pertama pemberdayaan menurut (Rifa'i, 2008) "...dimana setiap orang mulai mengembangkan kesadaran awal".

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan awal jumlah

UMKM susu sapi yang ada di Boyolali. Dari data tersebut baru bisa lakukan upaya awal seperti sosialisasi mengenai adanya program pemberdayaan UMKM salah satunya bagi pelaku UMKM susu sapi perah. Sasaran dari sosialisasi adalah membentuk perilaku dari pengusaha UMKM agar mau menerima perubahan usaha ke arah yang lebih baik. Sosialisasi sebagai langkah awal menyadarkan pelaku usaha sehingga dapat merubah *mind set* (Lambelanova, 2019) pelaku UMKM akan pentingnya pemberdayaan, Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara rutin dan bertahap dengan tujuan untuk mengajak pelaku usaha aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan dan pelaku usaha juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan pemberdayaan dalam memaksimalkan potensi usaha susu sapi perah di Kabupaten Boyolali.

b. Adanya kesediaan menerima perubahan

Dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan UMKM, para pelaku Usaha Mikro sebagai sasaran program pemberdayaan bersedia menerima upaya pemberdayaan tersebut dan mau berubah ke arah yang lebih baik/maju sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak Dinas menjelaskan bahwa respon dari pelaku Usaha Mikro susu sapi perah di Kabupaten Boyolali sendiri sangat beragam, ada yang bersikap masa bodoh, ada yang berspekulasi bahwa usahanya sudah berkembang dan tidak perlu adanya pelatihan lagi, namun kebanyakan dari pelaku Usaha Mikro mau menerima pemberdayaan karena mereka merasa membutuhkan untuk mengembangkan usahanya dan merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adanya kesediaan menerima paerubahan ini sejalan dengan pendapat Wilson dalam (Tukasno, 2013) mengenai tujuh tahapan pemberdayaan salah satunya adalah tahap keinginan dari masyarakat untuk berubah kearah yang lebih baik.

**Tabel 2.**

Target Sosialisasi Program Pemberdayaan

Kecamatan	Target	Capaian
Musuk	20	17
Cepogo	20	15
Mojosongo	20	20
Selo	20	20
Boyolali	20	18

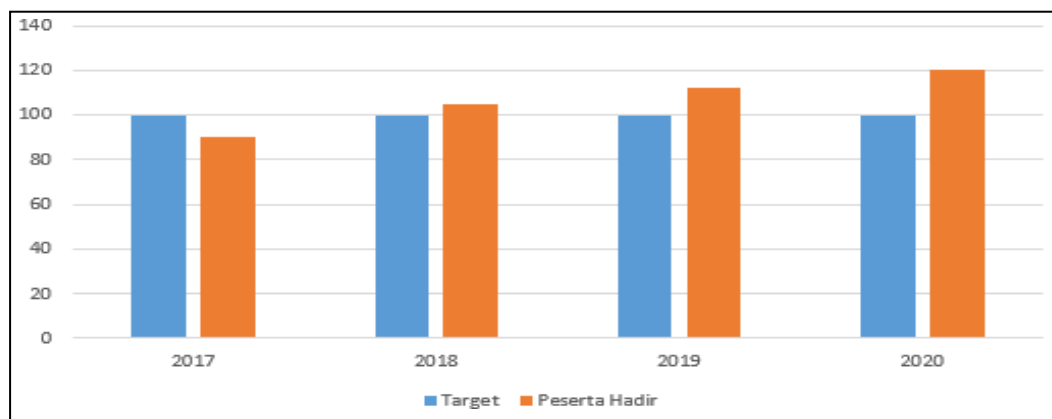
Sumber: LkjIP Diskopnaker, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi peserta UMKM susu sapi pada tahun pertama atau tepatnya ditahun 2017 masih rendah dilihat dari 3 Kecamatan

yang belum memenuhi target capaian sosialisasi, dan hanya 2 Kecamatan yaitu Mojosongo dan Selo yang telah menunjukkan tingkat partisipasi tinggi dalam kegiatan sosialisasi.

c. Aktif Melakukan Upaya Penyadaran

Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM susu sapi perah tidak hanya pemerintah saja yang aktif dalam melakukan upaya penyadaran, namun didukung juga oleh keaktifan dari pelaku UMKM susu sapi perah dalam setiap kegiatannya. Adanya partisipasi aktif dari kedua belah pihak akan menciptakan iklim pemberdayaan yang kondusif dan dapat menaikkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan UMKM susu sapi perah di Kabupaten Boyolali. Sejalan dengan (Moore et al., 2014) mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat : Keterlibatan masyarakat yang lebih luas, lebih umum digunakan untuk menambah kegiatan pendidikan setara. Menurut pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang telah diselenggarakan terkait pengembangan usaha mikro susu sapi perah di daerah Kabupaten Boyolali dalam 2 (dua) tahun terakhir, peserta yang mengikuti kegiatan selalu memenuhi target dan melebihi kuota yang ditetapkan.



**Gambar 1**  
**Grafik Partisipasi Peserta Sosialisasi Terhadap Program Pemberdayaan Usaha Mikro Susu Sapi Kabupaten Boyolali**

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi telah menunjukkan kesadaran dari pelaku sangat tinggi dimana dalam kegiatan sosialisasi dalam tiga tahun terakhir yang diselenggarakan di lima kecamatan penghasil susu terbesar di Kabupaten Boyolali selalu melebihi kuota peserta yang telah ditargetkan. Berdasarkan hasil di atas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam program pemberdayaan pelaku UMKM susu sapi perah telah menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi dari peserta di tahun 2018 sampai 2020, sejalan dengan enam indikator

keberhasilan pemberdayaan menurut (Mardikanto & Soebianto, 2017) poin pertama yaitu meningkatnya jumlah warga untuk hadir dalam tiap kegiatan. Walaupun di tahun pertama pelaksanaan program pemberdayaan yaitu tahun 2017 tingkat keaktifan pelaku UMKM susu sapi masih rendah. Selain pelaku UMKM susu sapi yang menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi, Dinas Koperasi dan tenaga Kerja Kabupaten Boyolali juga menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi dan dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi rutin di setiap tahunnya. Dengan tercapainya indikator keaktifan dalam upaya penyadaran ini membuktikan bahwa pemberdayaan dari Diskopnaker telah memenuhi dimensi/ tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, sejalan dengan (Theresia, Aprilia, 2014), mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah upaya melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik (*better community*).

#### **b) Tahap Transformasi Pengetahuan dan Kecakapan Keterampilan**

Tahapan kedua adalah tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dimana masyarakat mulai mempelajari berbagai kecakapan, mendapatkan informasi, pengetahuan dan kemampuan melakukan keterampilan yang relevan dengan situasi kondisi atau keadaan yang dibutuhkan. Tahap ini mendorong terbukanya pengetahuan pihak yang diberdayakan terhadap pemberian keterampilan yang dilakukan oleh pihak yang memberdayakan.

##### **a. Adanya Pemberian Pengetahuan**

Dalam kegiatan pemberdayaan UMKM susu sapi, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan upaya transformasi pengetahuan dalam wujud edukasi pengembangan usaha bagi pelaku UMKM susu sapi serta pemberian kecakapan keterampilan dalam wujud pelatihan-pelatihan terkait UMKM susu sapi perah di Kabupaten Boyolali. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (S.E, 2017) mengenai salah satu strategi pemberdayaan yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pengguna baik di dunia industri maupun dunia usaha.

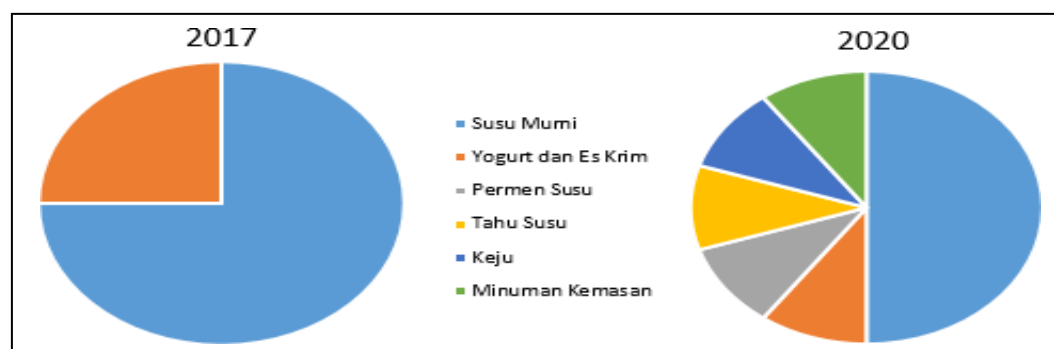
Menurut pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali yang secara langsung menangani program pemberdayaan UMKM susu sapi perah mengatakan bahwa, pemberian pelatihan dalam pemberdayaan UMKM susu sapi perah seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam produksi, pemasaran, dan pengembangan inovasi produk. Sedangkan pemberian

edukasi berupa edukasi mengenai cara pertahankan gizi susu dan edukasi pembuatan pakan sapi yang mampu menaikkan produktivitas susu, sesuai dengan (Hatimah, 2018) bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah proses pendidikan yang muncul, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, diharapkan dapat mempertahankan program pendidikan yang terjadi seumur hidup, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensinya.

**b. Adanya Perubahan Pola Pikir**

Pemberian pengetahuan dan kecakapan keterampilan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Pelaku UMKM susu sapi perah seperti pelatihan, edukasi, dan pembinaan selanjutnya ditujukan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM susu sapi yang diharap mampu menumbuhkan pola pikir pelaku usaha untuk selalu berinovasi dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pihak Dinas koperasi dan Tengan Kerja Kabupaten Boyolali menjelaskan bahwa setelah adanya program pemberdayaan yang dijalankan telah menunjukkan adanya perubahan pola pemikiran pelaku usaha yang dahulunya pelaku usaha menganggap pemberdayaan sebagai program tidak penting namun sekarang dianggap penting dan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Perubahan pola pemikiran pelaku UMKM susu sapi yang semakin maju ditunjukkan dengan munculnya berbagai inovasi olahan produk baru berbahan dasar susu sapi, yang terlihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 2**  
**Data Perbandingan Inovasi Olahan Produk Susu**  
**Kabupaten Boyolali 2017-2020**

*Sumber: Diskopnaker Kabupaten Boyolali 2020*

Berdasarkan gambar data tersebut bahwa selama proses pemberdayaan UMKM susu sapi perah pada tahun awal pelaksanaannya 2017 hingga 2020 membawa perubahan yang besar. Dari tahun awal hanya terdapat dua jenis produk

saja namun setelah berlangsungnya program pemberdayaan menjadi beberapa jenis olahan produk seperti keju, tahu susu, permen susu, dan lain-lain. Berkembangnya inovasi produk olahan ini sebagai hasil perubahan pola pemikiran pelaku UMKM yang semakin maju.

Perubahan pola pikir dari pelaku UMKM ini senada dengan pendapat yang disampaikan Wilson, dikutip oleh (Tukasno, 2013) tentang tahapan atau alur pemberdayaan yaitu bahwa akan terjadi perubahan nilai-nilai yang berimplikasi terhadap perubahan sikap dan perilaku yang mendorong ke arah keberhasilan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri.

### **c) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual**

Tahap peningkatan kemampuan intelektual adalah tahap pengayaan terhadap berbagai keterampilan masyarakat dalam pemberdayaan yang telah dijalankan, supaya pelaku UMKM susu sapi perah dapat menciptakan kemandirian, yang ditandai dengan adanya inisiatif, kreatifitas, dan menciptakan inovasi-inovasi baru di lingkungan atau daerahnya.

Pada tahapan akhir pemberdayaan UMKM susu sapi perah ini, pihak Pemerintah Kabupaten Boyolali melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan untuk mengetahui hasil dan perubahan yang didapatkan, sesuai dengan (Barasa, 2018) : yaitu kualitas fasilitasi lingkaran memerlukan pengawasan lebih lanjut dengan tujuan untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi diantara masyarakat yang diberdayakan.

#### **a. Terciptanya Kemandirian**

Tahapan peningkatan kemampuan intelektual pada pemberdayaan UMKM susu sapi perah ini, berupa pengayaan terhadap kemampuan keterampilan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali untuk menciptakan kemandirian dari pelaku UMKM susu sapi perah berupa munculnya inovasi-inovasi di lingkungan usaha atau kreasi-kreasi produk baru olahan susu sapi dari beberapa UMKM susu sapi seluruh kecamatan di Boyolali. Sejalan dengan (Chaerunisha, 2018), bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat lokal diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan mengakomodir kearifan lokal.

Setelah program pelatihan-pelatihan yang Pemerintah Kabupaten Boyolali jalankan kemampuan dan kemandirian pelaku UMKM susu sapi perah meningkat yang dari dulunya masih ada rasa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah namun sekarang rata-rata para pelaku UMKM susu sapi ini sudah bisa berjalan sendiri dan bahkan memunculkan inovasi-inovasi baru.

Bukan hanya mampu menciptakan produk baru olahan susu sapi, namun para peserta pemberdayaan yang menjadi pelaku UMKM susu sapi ini mampu memperluas jaringan pasar dengan melakukan kemitraan sebagai poin besar keberhasilan pemberdayaan ini.

**Tabel 3.**

Data Kemitraan Usaha Mikro Susu Sapi Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Nama Usaha Mikro	Jenis Produk	Kemitraan
1.	Sido Makmur	Es krim susu	Rest area Salatiga
2.	Horok Yogurt	Yogurt	Indomart
3.	Anna Susujelly	Susu jelly	Rest area solo
4.	Keju Indrakila	Keju	Transmart Semarang
5.	Rikando Barokah	Yogurt	Lotte market
6.	Milk Moe	Susu segar	Pusat oleh-oleh Jogja
7.	Kenyot Susu	Tahu susu	Pusat oleh-oleh Jogja

Sumber: Diskopnaker Kabupaten Boyolali

Pengembangan kemitraan telah gencar dilakukan oleh Diskopnaker guna membangun kerjasama yang menguntungkan antara pelaku UMKM dengan pihak swasta, dan Diskopnaker telah memfasilitasi dan memperantarai kerjasama antara pelaku UMKM dengan pihak swasta seperti alfamart, indomart, dan *rest area*. Terciptanya kemandirian tersebut sejalan dengan satu dari lima indikator keberhasilan pemberdayaan menurut (Sumodiningrat, 1999) yang mengatakan bahwa tanda peningkatan kemandirian kelompok adalah semakin berkembangnya usaha produktif, permodalan kelompok semakin kuat, serta administrasi kelompok semakin rapi.

b. Mampu Menyelesaikan Masalah Sendiri

Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM susu sapi perah oleh Diskopnaker Kabupaten Boyolali, kemampuan pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri merupakan tujuan akhir yang diharapkan pemerintah dalam



program pemberdayaan. Menurut penuturan dari pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali setelah terlaksananya upaya pemberdayaan UMKM susu sapi perah, pelaku usaha menunjukkan mampu menyelesaikan permasalahan terkait usahanya secara mandiri, dan terbukti pelaku UMKM mampu memanfaatkan masalah menjadi peluang pengembangan usaha. Contoh nyatanya adalah ketika terjadi pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 ini kebanyakan bidang UMKM mengalami kerugian, namun pelaku usaha susu sapi justru mengalami kenaikan omset penjualan. Kenaikan omset ini dipengaruhi oleh kemampuan pelaku UMKM susu sapi perah dalam merubah masalah menjadi peluang usaha dengan memasarkan produk susu yang berkualitas dengan tujuan menarik konsumen karena manfaat susu sebagai sumber pemenuh gizi. Adanya kemampuan menyelesaikan masalah sendiri ini sejalan dengan (Ismawati, 2020): Pemberdayaan dimaknai sebagai langkah yang ditujukan kepada masyarakat untuk memberikan daya atau kekuatan/ kemampuan (*empowerment*) dan penguatan (*strengthening*).

**Tabel 4.**

Kenaikan Omset UMKM Susu Sapi Perah Pada Masa Pandemi Covid-19

Nama UMKM	Omset Sebelum Pandemi	Omset Saat Pandemi
Horok Yogurt	7.000.000	8.000.000
Milk Moe	5.450.000	6.500.000
Rikando	6.000.000	7.000.000
Fresh Milk	4.000.000	4.800.000
Amanah	3.600.000	4.000.000

Sumber: Diskopnaker Boyolali, 2020

Berdasarkan data kenaikan omset penjualan UMKM susu sapi perah dapat diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 pelaku UMKM susu sapi mengalami kenaikan omset penjualan sebesar 10% – 15%. Kenaikan omset penjualan ini dipengaruhi oleh perilaku konsumtif masyarakat pada masa pandemi yang sangat membutuhkan produk-produk sehat yang dapat memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga kekebalan tubuh seperti gizi yang terkandung dalam olahan susu sapi. Dari masalah pandemi ini menjadikan ajang pelaku UMKM susu sapi untuk menghasilkan produk olahan susu yang berkualitas untuk menarik konsumen. Selain hal tersebut dalam rangka menarik konsumen maka pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk online baik di *facebook* maupun *instragram* sehingga dapat meningkatkan *customer market* yang lebih luas dan tidak hanya sebatas kunjungan ke lokasi UMKM saja,

sejalan dengan (Shantini, 2018) bahwa kegiatan yang dilakukan di media sosial tidak hanya mempromosikan program pendidikan, tetapi juga memperkenalkan kearifan lokal dan pendidikan berbasis karakter.

### **3. Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM Susu Sapi Perah Kabupaten Boyolali**

Setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang maupun badan usaha dan pemerintah sekalipun, tidak dapat terlepas dari adanya suatu hambatan yang dapat mengganggu jalannya program kegiatan tersebut, seperti halnya dengan upaya pemberdayaan UMKM susu sapi perah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Adapun faktor-faktor penghambat yang dimaksud sebagai berikut:

#### **1. Minim Inovasi Produk**

Masih banyak para pelaku usaha yang menggeluti usaha susu sapi hanya menjual produk susu sapi murni tanpa proses pengolahan tentunya dengan harga jual yang sangat murah, sedangkan pelaku usaha yang sudah menjual produk susu sapi dalam bentuk olahan hanya sebagian kecil saja padahal keuntungan hasil penjualan dapat meningkat berkali-kali lipat. Keterbatasan inovasi pengembangan produk oleh pelaku Usaha Mikro merupakan penyebab terhambatnya keberhasilan dari upaya pemberdayaan dikarenakan masih minimnya keberanian dari pelaku usaha dalam mengembangkan produk susu menjadi olahan baru yang lebih inovatif.

#### **2. Keterbatasan Anggaran**

Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM susu sapi perah oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, salah satu faktor yang mampu menghambat program pemberdayaan tersebut yaitu keterbatasan anggaran yang nantinya digunakan dalam setiap pembiayaan kegiatan seperti keperluan sarana prasarana, konsumsi, hingga biaya mendatangkan pelatih. Keterbatasan anggaran tersebut disebabkan karena adanya pemangkasan anggaran pelatihan dari Pemkab Boyolali yang dialihkan pada bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 menyebabkan upaya pelatihan UMKM susu sapi perah kurang maksimal karena dilakukan seadanya mengingat keterbatasan anggaran.

#### **3. Sifat Bahan Baku Yang Sensitif**

Bahan baku yang digunakan UMKM produksi berbagai olahan susu sapi tentu berbahan dasar susu sapi perah. Pada dasarnya susu memiliki karakteristik sifat yang sensitif dan mudah basi karena pengaruh suhu, bahan campuran, dan bentuk

pengolahan. Karena sifat susu yang sangat sensitif dan memerlukan penanganan khusus ini menyebabkan jumlah pelaku UMKM susu menjadi sedikit dibandingkan pengolahan lainnya. Hal inilah yang mendorong pelaku usaha susu sapi menjadi enggan mengembangkan olahan susu lebih jauh lagi. Pelaku usaha menjadi takut produknya tidak diterima di pasaran karena kualitas produk olahan susu sapi perah yang buruk.

#### **4. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktifitas UMKM Susu Sapi Perah**

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, secara garis besar pemberdayaan UMKM susu sapi perah sudah sesuai dengan tahapan pemberdayaan, namun tentunya terdapat kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan. Menyikapi adanya kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi telah berupaya untuk meningkatkan produktifitas UMKM susu sapi perah dengan upaya pemberdayaannya berusaha meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan pengolahan susu yang baik dan benar guna mempertahankan kualitas gizi produk olahan susu, sejalan dengan (Ardilasunu & Sudarwanto, 2017) bahwa kualitas susu segar yang dihasilkan sapi perah di Kabupaten Boyolali kualitasnya masih rendah oleh karena itu perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan pemasaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja telah membangun kemitraan antara pelaku UMKM susu sapi perah dengan pihak swasta seperti Supermarket, Swalayan, Rest area, dan Perusahaan swasta lainnya. Adanya kerjasama kemitraan dengan pihak swasta nantinya diharapkan dapat mendorong penambahan volume produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam rangka mempersiapkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar mampu menghadapi berbagai tantangan global dalam arus globalisasi dan semakin tingginya daya saing, maka salah satu upayanya adalah dengan perluasan area pemasaran (Sedyastuti, 2018).

Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam hal sarana dan prasarana telah berupaya bekerjasama dengan pihak manapun baik BUMN, Bank dan lainnya. Terutama dalam menyediakan tempat pelatihan dan pembinaan, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja telah meminta kepada baik kecamatan dan kelurahan untuk mengadakan sosialisasi dalam penyediaan sarana dan prasarana guna melaksanakan proses pelatihan dan pendampingan dengan baik, dengan harapan nantinya mampu menghasilkan pelaku UMKM yang produktif. Hal ini sejalan dengan (Febriyati & Suyanto, 2017) bahwa tahapan dalam pemberdayaan dilakukan dengan pelatihan dan

pendampingan. Dalam perizinannya, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja memberikan bantuan dan pelayanan yang cukup ringkas dan efektif dalam meningkatkan percepatan kepengurusan berbagai jenis perizinan usaha. Diskopnaker juga telah memfasilitasi pengurusan dokumen perizinan di luar lingkup Diskopnaker sebagai penerbitan surat izin seperti izin BPOM, sertifikasi halal, dan hak paten. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dari pelaku UMKM susu sapi perah. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja telah memberikan bentuk dukungan materi seperti bantuan alat produksi yang disalurkan kepada kelompok-kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah untuk mendorong peningkatan kualitas dan jumlah produksi.

## **V. Kesimpulan**

Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM susu sapi perah oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terlihat dengan meningkatnya kesadaran dari pelaku UMKM susu sapi akan potensi yang ada didaerahnya yang ditunjang oleh adanya upaya penyadaran. Dalam upaya penyadaran tersebut, pelaku UMKM juga menunjukkan tingkat keaktifan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Selain upaya penyadaran, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja juga mengadakan kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan pelaku usaha melalui pelatihan-pelatihan secara rutin. Adanya pelatihan ini telah membawa perubahan yang signifikan dari pola pemikiran pelaku usaha, dimana perubahan pola pikir ini ditandai dengan semakin berkembangnya inovasi olahan produk susu sapi sebagai hasil proses berpikir mengembangkan produk menjadi lebih baik lagi. Tujuan akhir yang menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan UMKM susu sapi perah adalah terciptanya kemandirian dan yang menjadi perbedaan dengan pemberdayaan lainnya, ditunjukkan dengan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa bergantung kepada pemerintah dimana pada masa Covid-19 disaat sebagian besar sektor UMKM mengalami kerugian, namun UMKM susu sapi mampu bertahan dan menaikkan omset penjualan (tabel 4) atau kapasitasnya semakin bertambah, selain itu adanya kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM, serta memfasilitasi pengurusan dokumen perizinan di luar lingkup Diskopnaker sebagai penerbit surat izin seperti izin BPOM, sertifikasi halal, dan hak paten.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat direkomendasikan proses pemberdayaan pada UMKM susu sapi perah sebagai berikut:

1. Pembinaan/ pendampingan berkesinambungan/ berkelanjutan kepada UMKM susu perah yang diselenggarakan oleh stakeholders terkait, artinya tidak hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja saja tetapi juga melibatkan dinas lain seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian, serta melibatkan *private sector* yang dapat dijadikan bapak asuh dengan memanfaatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*), senada dengan (Maryani & Lambelanova, 2019) bahwa agar pelaksanaan pemberdayaan secara berkelanjutan diperlukan komitmen untuk melakukan fasilitasi distribusi pemasaran hasil produksi, mempermudah akses perbankan bagi para pelaku usaha, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan peningkatan kerjasama antar kabupaten/kota dan antar provinsi.
2. Dalam rangka meningkatkan tingkat kehadiran peserta pelatihan sebaiknya waktu disesuaikan dengan waktu luang dari pelaku UMKM susu perah, selama ini selalu dilaksanakan pada pagi hari diubah menjadi siang hari. Karena pada pagi hari kebanyakan peserta pelatihan masih melakukan kegiatan produksi usaha dan kebanyakan peserta pelatihan lebih memilih untuk memproduksi olahan susu daripada mengikuti pelatihan.
3. Dalam rangka penghematan anggaran yang dikeluarkan pada kegiatan pelatihan, serta mengurangi resiko penularan Covid-19, selain pelaksanaannya secara tatap muka yang selama ini dilakukan Diskopnaker Kabupaten Boyolali, dilaksanakan juga secara daring
4. Bagi pelaku UMKM susu sapi perah dalam rangka penciptaan mitra usaha, sebaiknya membentuk suatu kelompok atau paguyuban yang terdiri dari pelaku usaha sebagai pengolah susu menjadi produk olahan dengan petani susu sapi sebagai pemasok susu untuk keperluan produksi. Dengan adanya paguyuban dapat menciptakan iklim usaha yang saling menguntungkan, dari pelaku usaha dapat memperoleh bahan baku susu yang terjamin kualitasnya dengan harga terjangkau, dan bagi petani susu dapat memasarkan susu sapi perahnya kepada pengolah susu
5. Memberikan kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM, serta memfasilitasi pengurusan dokumen perizinan di luar lingkup pemerintah daerah (Diskopnaker) sebagai penerbit surat izin seperti izin BPOM, sertifikasi halal, dan hak paten sehingga meningkatkan percepatan pengurusan berbagai jenis perizinan usaha.

6. Memanfaatkan teknologi informasi guna memperluas jaringan pemasaran dengan melalui internet maupun media sosial seperti instagram, facebook dll.

## **VI. Daftar Pustaka**

- Ahmada, Z. R. (2019). *Model pemberdayaan peternak sapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Wilayah Kroya : studi di Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap*.
- Anwas, E. O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Alfabeta.
- Ardilasunu, W., & Sudarwanto, M. (2017). Peningkatan Kualitas Susu Peternakan Rakyat di Boyolali melalui Program Penyuluhan dan Pendampingan Peternak Sapi Perah. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.2.2.55-60>
- Barasa, F. S. (2018). Community Empowerment and Adult Literacy through REFLECT Methodology: Lessons from Mumias, Kenya. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(11), 893–900. <https://doi.org/10.21275/ART20192895>
- Barokah, U. (2009). Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Boyolali. *Sains Peternakan*, 7(2), 80–86.
- Boediono. (1993). *Ekonomi Makro*. BPFEE.
- BPS. (2019). Jawa Tengah Dalam Angka. In *Jawa Tengah Dalam Angka*.
- Chaerunisha, S. N. ; P. S. S. D. S. gassing. (2018). Optimization Mursala Waterfall in Improving Community Potency, Welfare through Local Wisdom in Central Tapanuli Regency. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(8), 1007–1015. <https://doi.org/10.21275/ART2019683>
- Darwis, H. M. (2013). Kajian komunitas petani rumput laut sebagai alternatif kelangsungan hidup masyarakat pesisir Kabupaten Jenepono. *Socius*, XII(1).
- Febriyati, & Suyanto. (2017). Pemberdayaan Lansia melalui Usaha Ekonomi Produktif oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1). <http://journal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI>
- Hatimah, I. (2018). Community-Based Education Model to Empower Community in Utilizing Local Potentials. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(6), 716–722. <https://doi.org/10.21275/ART20183216>
- Ismawati, N. R. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6 (1), 91.
- Lambelanova, R. (2019). COMMUNITY EMPOWERMENT OF THE FORMER RED-

- LIGHT DISTRICT OF DOLLY IN SURABAYA, EAST JAVA PROVINCE. *The 2019 WEI International Academic Conference Proceedings*, 120–140. <https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/WEI-HUM-2019-Boston-Proceedings.pdf>
- Lord, J., & Hutchison, P. (2014). The Process of Empowerment: Implications for Theory and Practice. *Canadian Journal of Community Mental Health*. <https://doi.org/10.7870/cjcmh-1993-0001>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Maryani, D., & Lambelanova, R. (2019). Government role in influencing creative economy for community purchasing power. *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 17(2), 835–843. <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.V17I2.9711>
- Moore, L., Chersich, M. F., Steen, R., Reza-Paul, S., Dhana, A., Vuylsteke, B., Lafort, Y., & Scorgie, F. (2014). Community empowerment and involvement of female sex workers in targeted sexual and reproductive health interventions in Africa: A systematic review. *Globalization and Health*. <https://doi.org/10.1186/1744-8603-10-47>
- Muzha, V. K. (2013). Pengembangan agrowisata dengan pendekatan community based tourism (studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu dan Kusuma agrowisata Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 135–141.
- Rifa'i, A. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*. UNNES Press.
- S.E, M. (2017). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ombak.
- Sandy, R. P. V., Hamid, H., & Fadhilah, H. A. (2021). PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA KEBUN BELIMBING DI KECAMATAN TAWANGHARJO, KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6, Nomor 1, 75–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1567>
- Saraswati, E., Hatnery, A. I., & Dewi, A. N. (2020). Implementasi model diamond Porter dalam membangun keunggulan bersaing pada kawasan agrowisata Kebun Belimbing Ngringinrejo Bojonegoro. *JIMMU (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 4(2), 108–132.
- Satori, D., & Komariah, A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sawitri, A. P., Ajiningrum, P. S., & Suhardiyah, M. (2018). Peningkatan Ekonomi

- Peternak Sapi Perah dan Masyarakat Desa Melalui Diversifikasi Produk Olahan Dengan Bahan Baku Susu Sapi. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 272–278. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpm%0D>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Shantini, A. P. D. N. K. D. V. R. H. D. Y. (2018). Marketing Strategies of Cultural Literacy Program in Non-Formal Educational Institution. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(3), 1466–1471. <https://doi.org/10.21275/ART2018820>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. CV Rajawali.
- Suharto, E. (2014a). *Membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014b). *Membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susilowati, A., Hambali, I., & Wahyuni, S. (2019). Kemandirian Peternak Sapi Perah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(2) 76. <https://doi.org/10.17977/um041v14i2p76-84>
- Theresia, Aprilia, D. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta.
- Tukasno. (2013). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *Manajemen Dan Bisnis*, 3–2, 183. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jmb/article/view/602>
- Yuniasari, H., Prihatini, J., & Syaefulloh. (2021). PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BAMBU SABUK SEMERU DI DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6, Nomor 1, 57–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1580>

